

**Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Di Kabupaten Kutai Barat**

**FACTOR WHICH AFFECTED LAND AND BUILDING TAXES AND LOCAL  
OWN-SOURCE REVENUE IN WEST KUTAI DISTRICT**

**Oleh :  
AMI PARAMBAN  
(A Student of Master Program of Economics)**

**Adnan Haris Musa  
Adi Wijaya  
(Faculty Economics and Business)**

**ABSTRACT**

Based on the Regional Autonomy Policy, the Local Government will not be able to perform its function well, effectively and efficiently without sufficient financial support to provide services to the public and to realize the developmental programs. One of the local financial sources for the development comes from its own-source revenue or from the central government support (either from infrastructure development fund or from and building tax revenue). The role of tax is very important in supporting the accomplishment of local development. Therefore, developing and optimizing the land and building tax revenue becomes very important, so that a study on land and building tax and local own-source revenue is urgently needed.

This research aims to test the factors which affected the land and building tax and local own-source revenue in West Kutai District. The data consisted of secondary data which were collected from the Local Revenue Office of West Kutai District and from Central Bureau of Statistics of West Kutai District. The data were collected using direct observation then the data were analyzed by using Path Analysis.

The result of statistical test showed that GRDP (gross Regional Domestic Product) per capita had a positive but insignificant effect on the land and building tax revenue, while the number of tax payers had a positive and significant effect on the increase of land and building tax revenue in West Kutai District. Land and Building Tax revenue had a positive and significant effect on the local own-source revenue of West Kutai District.

*Keywords: Own-Source Revenue, Land and Building Tax, GRDP per capita, Number of Tax Payers.*

**ABSTRAK**

Sesuai dengan Kebijakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, efektif dan efisien tanpa dukungan dana yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan program pembangunan. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun bantuan Pemerintah Pusat (baik dana pembangunan prasarana maupun penerimaan PBB). Sehingga peranan pajak sangat besar dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di daerah. Karenanya mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan PBB menjadi sangat penting, untuk itu penelitian tentang PBB serta PAD sangat diperlukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor – faktor yang mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Kutai Barat. Data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat. Adapun metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan Analisis Jalur (Path Analysis).

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa secara parsial PDRB perkapita berpengaruh positif namun tidak signifikan pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, PDRB per kapita, Jumlah Wajib Pajak

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan upaya memanfaatkan segala potensi yang ada di masing-masing daerah; karenanya pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaannya diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000). Sesuai pencerminan dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; maka setiap daerah akan memasuki era baru dalam Penataan Sistem Pemerintahan dan Sistem Perekonomian. Setiap daerah dituntut bersaing secara positif dalam kegiatan perekonomian jika tidak ingin ketinggalan dengan daerah lain.

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pemerintah Pusat. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka sebagai upaya Pemerintah Daerah dengan cara penggalian sumber-sumber pendapatan daerah baru maupun mengefektifkan cara-cara penarikan PBB.

Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai dampak yang luas, karena penerimaan PBB diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah sebesar 90% dan 10% sebagai penerimaan Pemerintah Pusat (Undang-Undang nomor 25 tahun 1999); PBB mempunyai Jumlah Wajib Pajak (WP) terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak lain; Penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat dan PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini memberikan semangat bagi daerah-daerah untuk meningkatkan berbagai aspek yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Ini merupakan alasan pertama pentingnya penelitian ini.

Ghofir (2000) mengungkapkan bahwa sebelum penerapan otonomi daerah, diperlukan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhinya. Syarat tersebut harus dipersiapkan jauh sebelum otonomi daerah tersebut diterapkan. Kondisi ini diperlukan demi kesinambungan pembangunan agar setelah diterapkannya otonomi daerah kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Disamping sumber daya alam dan sumber daya manusia yang telah dimiliki; alternatif pembiayaan pembangunan dapat dicapai yaitu dengan pemberdayaan PBB. PBB adalah salah satu unsur Pendapatan Daerah Sendiri (PDS). PDS merupakan salah satu sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Realisasi penerimaan Pendapat Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kutai Barat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Realisasi penerimaan Pendapat Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kutai Barat, tahun 2005 – 2014.

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1.	2005	61.912.788.567,80	10.015.504,00
2.	2006	33.377.986.769,59	9.620.055,00
3.	2007	44.716.016.814,54	641.006.000,00
4.	2008	37.955.869.457,57	56.250.000,00
5.	2009	58.451.459.120,07	1.020.317.000,00
6.	2010	38.249.153.244,36	560.685.000,00
7.	2011	60.691.299.465,53	1.790.527.000,00
8.	2012	69.619.795.728,28	1.066.135.834,00
9.	2013	88.616.089.135,38	1.883.367.094,00
10.	2014	106.477.193.691,50	1.988.705.638,04

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat diketahui bahwa sejak periode 6 (enam) tahun terakhir (2005-2010) perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat tidak stabil, baru pada tahun 2011 – 2014 terlihat peningkatan yang cukup pesat, peningkatan ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di mana daerah sudah mulai berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah secara tegas tercermin di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dalam hal ini bersumber dari pajak dan keuntungan produk- produk yang dihasilkan dari perusahaan milik daerah.

Menurut Insukindro, dkk (1994:1) Sumber dana dari dalam negeri yang utama berasal dari daerah sendiri, sumber yang cukup potensial untuk membiayai berbagai aktivitas pembangunan adalah dari sektor pajak, utamanya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikenal dengan iuran pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah termasuk di kabupaten Kutai Barat, seiring dengan peningkatan pembiayaan pembangunan ekonomi diharapkan realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun meningkat pula, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pun juga meningkat.

Pada Tabel 1.1. diatas dapat dilihat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir (2005-2014) mengalami fluktuasi terkadang melebihi target dan tidak mencapai target. Fenomena diatas menimbulkan pertanyaan mengapa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Kutai Barat fluktuatif, sehingga diduga berpengaruh pula pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat yang tidak stabil ?. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut faktor – faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat.**"

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah PDRB per kapita secara langsung berpengaruh terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat?
2. Apakah Jumlah Wajib Pajak secara langsung berpengaruh terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat ?

3. Apakah PDRB per kapita secara langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat ?
4. Apakah Jumlah Wajib Pajak secara langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat ?
5. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat ?
6. Apakah PDRB per kapita secara tidak langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kutai Barat ?
7. Apakah Jumlah Wajib Pajak secara tidak langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kutai Barat.
2. Menganalisis pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kutai Barat.
3. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat.
4. Menganalisis pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat.
5. Menganalisis pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat.
6. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kutai Barat.
7. Menganalisis pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kutai Barat.

## **Dasar Teori**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah".

Menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut (Mardiasmo, 2006 : 124), dalam menunjang usaha pemerataan pembangunan dan agar tercapai pertumbuhan ekonomi maka pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya antara lain melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak baru yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985, kemudian UU ini diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 yang mulai berlaku 1 Januari 1994.

Defenisi Pajak Bumi dan Bangunan dari beberapa ahli :

- 1) Oleh (Soemitro dan Muttaqin, 2001 : 3), pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh sebab itu keadaan atau

status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

- 2) Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak pbb belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006 : 14-2).

Dari ketiga pengertian tentang PBB, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat yang diberlakukan sebagai pengganti pajak-pajak yang sejenis dan dikenakan atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (harta tak gerak) yang didasarkan atas dasar Nilai Jual Objek Pajak serta sebagian besar hasil penerimaannya diserahkan kepada daerah untuk membantu pembiayaan pembangunan di daerah, dalam tujuan dan dalam rangka perimbangan keuangan daerah.

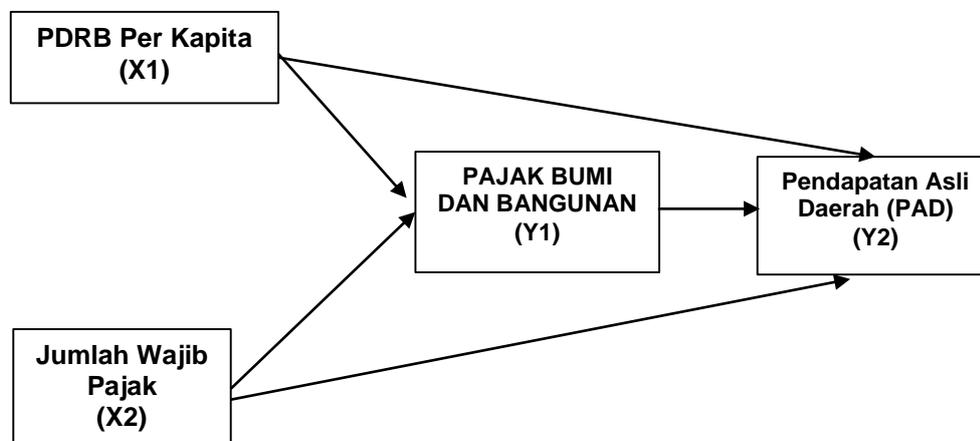
### Konsep Produk Domestik Bruto (PDRB)

Menurut (*sadono sukirno, 2004*) PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan factor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan factor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut.

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

### Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini meliputi kajian teori (Keuangan Negara, Pendapatan Asli Daerah, PBB, PDRB per Kapita serta Jumlah Wajib Pajak) dari kajian teori akan menghasilkan hipotesis (kesimpulan sementara), dan menghasilkan analisis (perhitungan) dan menghasilkan hasil penelitian.



Gambar 2.2. Kerangka Konsep Penelitian

### Hipotesis

Dari latar belakang, rumusan masalah dan teori yang telah diuraikan maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Diduga PDRB per kapita secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kutai Barat.
- H2 : Diduga Jumlah Wajib Pajak secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kutai Barat.
- H3 : Diduga PDRB Per Kapita secara langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat.
- H4 : Diduga Jumlah Wajib Pajak secara langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat.
- H5 : Diduga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat.
- H6 : Diduga PDRB Per Kapita secara tidak langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Banguna (PBB) di Kabupaten Kutai Barat.
- H7 : Diduga Jumlah Wajib Pajak secara tidak langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Banguna di Kabupaten Kutai Barat

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat penjelasan (*eksplanatory*), yakni menjelaskan pengaruh antara PDRB per kapita ( $X_1$ ), Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ ) sebagai variabel bebas terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai variabel dependent. Kemudian pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat.

Sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu Pengaruh PDRB per Kapita dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat. Adapun data - data yang diambil mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 berupa data sekunder.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis, untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisa pengaruh total PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.

### ANALISIS

Persamaan Sub-Struktur 1 :  $Y_1 = P_{Y_1X_1}X_1 + P_{Y_1X_2}X_2 + P_{Y_1} \varepsilon_1$

a. *Output ANOVA.*

Tabel 5.2. ANOVA<sup>a</sup> Sub Struktur 1

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4056108059264753700,000	2	2028054029632376830,000	10,067	,009 <sup>b</sup>
Residual	1410202944376863490,000	7	201457563482409056,000		
Total	5466311003641617400,000	9			

a. Dependent Variable: Pajak Bumi dan Bangunan

b. Predictors: (Constant), Jumlah Wajib Pajak, PDRB perkapita

Tabel ANOVA dapat dianalisis sebagaimana berikut :

- 1) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat.

$H_0$  : model persamaan sub struktur 1 tidak dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Pajak Bumi dan Bangunan yang dipengaruhi PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak.

$H_1$  : model persamaan sub struktur 1 dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Pajak Bumi dan Bangunan yang dipengaruhi PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak.

2) Kriteria pengujian :

Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima

Jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.

Dari tabel 5.2 diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 10,067 dan signifikansi sebesar 0,009.  $F_{Table Statistic}$  (Priyatno, 2008 : 214) diperoleh  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 0,05 dengan  $df_1$  (jumlah variabel-1) = 2, dan  $df_2$  (n-k-1) atau 10-2-1 = 7 sebesar 3,260.

3) Kesimpulan F.

Perbandingan nilai  $F$  menunjukkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (10,067 > 3,260) dan signifikansi < 0,05 (0,009 < 0,05), maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ . Jadi, dapat disimpulkan model persamaan sub struktur 1 dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Pajak Bumi dan Bangunan yang dipengaruhi PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak.

b. *Output Coefficients*<sup>a</sup>.

Tabel 5.3. *Coefficients*<sup>a</sup> Sub Struktur 1  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-20465178,651	977023215,123		-2,095	,074		
1 PDRB perkapita	2,279	4,141	,167	,550	,599	,401	2,495
Jumlah Wajib Pajak	71103,195	29710,594	,726	2,393	,048	,401	2,495

a. Dependent Variable: Pajak Bumi dan Bangunan

1) Dari tabel 5.3 diperoleh model persamaan sub struktur 1 untuk memperkirakan Pajak Bumi dan Bangunan yang dipengaruhi oleh PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak adalah:

$$Y_1 = 0,167.X_1 + 0,726.X_2$$

2)  $t$  hitung (Priyatno, 2008 : 147) adalah pengujian signifikansi (uji  $t$ ) untuk mengetahui pengaruh variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$  secara parsial, apakah berpengaruh signifikan atau tidak.

Pengujian koefisien variabel PDRB perkapita ( $X_1$ ) :

a) Merumuskan hipotesis.

$H_0$  : PDRB perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

$H_1$  : PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

b) Menentukan  $t$  hitung dan signifikansi.

Dari *output Coefficients* (tabel 5.3) didapat  $t$  hitung sebesar 0,550 dan signifikansi 0,599.

- c) Menentukan t tabel.  
t tabel dapat dilihat pada tabel statistik (Prayitno, 2008 : 213) pada signifikansi  $0,05/2 = 0,25$  dengan derajat kebebasan  $df = n-k-1$  atau  $10-2-1 = 7$ . Sementara itu, hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar -2,365.
- d) Kriteria pengujian.  
Jika  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan jika  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$  atau  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.  
Berdasarkan signifikansi :  
Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan jika signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.
- e) Membuat kesimpulan.  
Nilai t hitung  $< t \text{ tabel}$  ( $0,550 < 2,365$ ) dan signifikansi  $> 0,05$  ( $0,599 > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima. Jadi disimpulkan bahwa PDRB perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.  
Pengujian koefisien variabel Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ ) :
- a) Merumuskan hipotesis.  
 $H_0$  : Jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan  
 $H_1$  : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan
- b) Menentukan t hitung dan signifikansi.  
Dari *output Coefficients* didapat t hitung sebesar 2,393 dan signifikansi 0,048.
- c) Menentukan t tabel.  
t tabel dapat dilihat pada tabel statistik (Priyatno, 2008 : 213) pada signifikansi  $0,05/2 = 0,25$  dengan derajat kebebasan  $df = n-k-1$  atau  $10-2-1 = 7$ . Sementara itu, hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar -2,365.
- d) Kriteria pengujian.  
Jika  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan jika  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$  atau  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.  
Berdasarkan signifikansi :  
Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan jika signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.
- e) Membuat kesimpulan.  
Nilai t hitung  $> t \text{ tabel}$  ( $2,393 > 2,365$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,048 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi disimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

$$\text{Persamaan Struktur 2 : } Y_2 = P_{Y_2X_1}X_1 + P_{Y_2X_2}X_2 + P_{Y_2Y_1}Y_1 + PY_2 \varepsilon_2$$

c. *Output Model Summary.*

Tabel 5.4. *Model Summary*<sup>b</sup> Sub Struktur 2

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,941 <sup>a</sup>	,885	,828	9752008377,41823	1,360

a. Predictors: (Constant), Pajak Bumi dan Bangunan, PDRB perkapita, Jumlah Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

- 1) Angka R didapat 0,941, artinya korelasi antara variabel PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,941. Hal ini berarti hubungan yang sangat erat.
- 2) Nilai  $R^2$  sebesar 0,885, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 88,5%, sedangkan sisanya sebesar 11,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.
- 3) Nilai DW dari *output* didapat 1,360. Untuk nilai dL dan dU dapat dilihat dari DW tabel pada signifikansi 0,05 dengan n (jumlah data) = 10 dan k (jumlah variabel independen) = 2 di dapat nilai dL adalah 0,6972 dan dU adalah 1,6413. Jadi  $4-dU = 2,3587$  dan  $4-dL = 3,3028$ . Hal ini berarti  $1,6413 > 1,360 < 2,3587$  atau  $dU > DW < 4-dU$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi persamaan sub struktur 2.

d. *Output ANOVA.*

Tabel 5.5 *Anova*<sup>a</sup> Sub Struktur 2  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4408849488981947 600000,000	3	146961649632731 6000000,000	15,453	,003 <sup>b</sup>
1 Residual	5706100043594118 00000,000	6	951016673932353 00000,000		
Total	4979459493341360 000000,000	9			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Bumi dan Bangunan, PDRB perkapita, Jumlah Wajib Pajak

Tabel ANOVA dapat dianalisis sebagaimana berikut :

- 1) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat.
  - $H_0$  : model persamaan sub struktur 2 tidak dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan.
  - $H_1$  : model persamaan sub struktur 2 dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Kriteria pengujian :
  - Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima
  - Jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.
 Dari tabel 5.5 diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 15,453 dan signifikansi sebesar 0,003.  $F_{Table Statistic}$  (Priyatno, 2008 : 214) diperoleh  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 0,05 dengan  $df_1$  (jumlah variabel-1) = 3, dan  $df_2$  (n-k-1) atau  $10-3-1 = 6$  sebesar 4,760.
- 3) Kesimpulan F.
  - Perbandingan nilai F menunjukkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $15,453 > 4,760$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,003 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ . Jadi, dapat disimpulkan model persamaan sub struktur 2 dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan.

e. *Output Coefficients*<sup>a</sup>.Tabel 5.6. *Coefficients*<sup>a</sup> Sub Struktur 2  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	99282455920 ,116	27075291 336,561		3,667	,010		
PDRB perkapita	307,175	91,903	,745	3,342	,016	,384	2,603
1 Jumlah Wajib Pajak	-2139676,082	870430,30 2	-,724	-2,458	,049	,220	4,537
Pajak Bumi dan Bangunan	26,558	8,212	,880	3,234	,018	,258	3,876

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

- 1) Dari tabel 5.6 diperoleh model persamaan sub struktur 2 untuk memperkirakan Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi oleh PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan :

$$Y_2 = 0,745.X_1 - 0,724.X_2 + 0,880 Y_1$$

- 2) Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengujian koefisien variabel PDRB perkapita ( $X_1$ ) :

- a) Merumuskan hipotesis.

$H_0$  : PDRB perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

$H_1$  : PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

- b) Menentukan t hitung dan signifikansi.

Dari *output Coefficients* didapat t hitung sebesar 3,342 dan signifikansi 0,016.

- c) Menentukan t tabel.

t tabel dapat dilihat pada tabel statistik (Prayitno, 2008 : 213) pada signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  dengan derajat kebebasan  $df = n-k-1$  atau  $10-3-1 = 6$ . Sementara itu, hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar -2,447

- d) Kriteria pengujian.

Jika  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan jika  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$  atau  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan signifikansi :

Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan jika signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.

- e) Membuat kesimpulan.

Nilai t hitung  $> t$  tabel ( $3,342 > 2,447$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,016 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak.

Jadi disimpulkan bahwa PDRB per Kapita berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengujian koefisien variabel Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ ) :

- a) Merumuskan hipotesis.

$H_0$  : Jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

$H_1$  : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

- b) Menentukan t hitung dan signifikansi.

Dari *output Coefficients* didapat t hitung sebesar -2,458 dan signifikansi 0,049.

- c) Menentukan t tabel.  
t tabel dapat dilihat pada tabel statistik (Prayitno, 2008 : 213) pada signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  dengan derajat kebebasan  $df = n-k-1$  atau  $10-3-1 = 6$ . Sementara itu, hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar -2,447
- d) Kriteria pengujian.  
Jika  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan jika  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$  atau  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan signifikansi :  
Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan jika signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.
- e) Membuat kesimpulan.  
Nilai  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  ( $-2,447 < -2,458 < 2,447$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,049 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi disimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengujian koefisien variabel Pajak Bumi dan Bangunan ( $Y_1$ ) :

- a) Merumuskan hipotesis.  
 $H_0$  : Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah  
 $H_1$  : Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- b) Menentukan t hitung dan signifikansi.  
Dari *output Coefficients* (tabel 5.6) didapat t hitung sebesar 3,234 dan signifikansi 0,018.
- c) Menentukan t tabel.  
t tabel dapat dilihat pada tabel statistik (Priyatno, 2008 : 213) pada signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  dengan derajat kebebasan  $df = n-k-1$  atau  $10-3-1 = 6$ . Sementara itu, hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 2,447.
- d) Kriteria pengujian.  
Jika  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan jika  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$  atau  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.  
Berdasarkan signifikansi :  
Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan jika signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.
- e) Membuat kesimpulan.  
Nilai  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $3,234 > 2,447$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,018 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

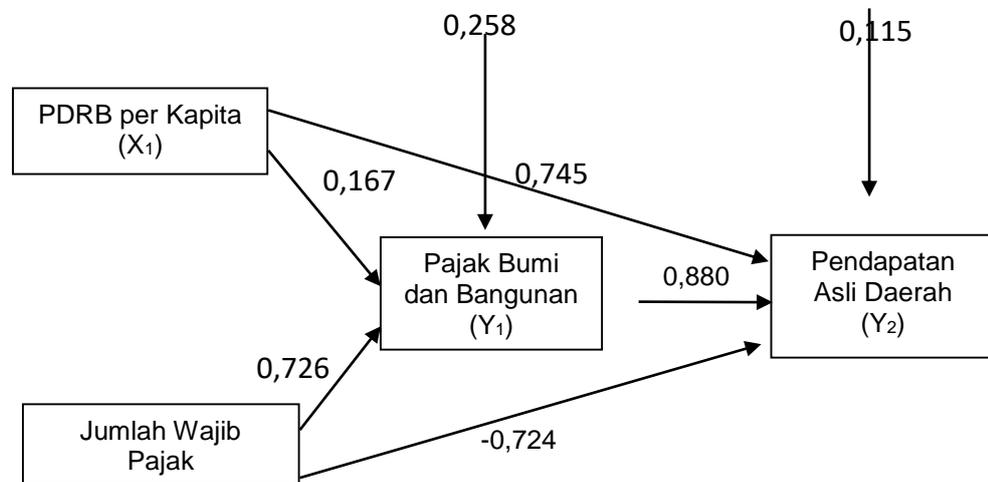
Dekomposisi Koefisien Jalur.

Dari model persamaan sub struktur 1 dan model persamaan sub struktur 2 yang telah distandarkan, diperoleh model persamaan regresi dengan koefisien jalur sebagai berikut :

$$Y_1 = 0,167.X_1 + 0,726.X_2 + 0,258$$

$$Y_2 = 0,745.X_1 - 0,724.X_2 + 0,880 Y_1 + 0,115$$

Kemudian untuk koefisien jalur tersebut dapat digambarkan beserta diagram jalur sebagaimana berikut ini :



Gambar 5.3. Model Diagram Jalur Dengan Koefisien Jalur

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh kausal langsung variabel eksogen PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak terhadap variabel endogen Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat dan pengaruh kausal tidak langsung variabel eksogen PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak terhadap variabel endogen Pendapatan Asli Daerah melalui variabel endogen Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kutai Barat, serta pengaruh kausal total variabel eksogen PDRB perkapita dan Jumlah Wajib Pajak terhadap variabel endogen Pendapatan Asli Daerah melalui variabel endogen Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kutai Barat, dilakukan dekomposisi koefisien jalur sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.7. Dekomposisi Koefisien Jalur Model Lengkap

No.	Hubungan	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tak Langsung melalui $Y_1$	Total
1	2	3	4	5
1	$X_1 \rightarrow Y_1$	0,167	-	-
2	$X_2 \rightarrow Y_1$	0,726	-	-
3	$X_1 \rightarrow Y_2$	0,745	-	-
4	$X_2 \rightarrow Y_2$	-0,724	-	-
5	$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,880	-	-
6	$X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	-	0,1470	-
7	$X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	-	0,6389	-
8	$(X_1 \rightarrow Y_2) + (X_1 \rightarrow Y_1)(Y_1 \rightarrow Y_2)$	-	-	0,8920
9	$(X_2 \rightarrow Y_2) + (X_2 \rightarrow Y_1)(Y_1 \rightarrow Y_2)$	-	-	-0,0851

## PEMBAHASAN

Dari analisis regresi terhadap model persamaan sub struktur 1 dan model persamaan sub struktur 2, diperoleh hasil pengujian terhadap hipotesis yang telah diajukan, dapat dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen sebagaimana berikut :

1. Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil uji  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,550 < 2,365$ ) dan signifikansi  $> 0,05$  ( $0,599 > 0,05$ ), PDRB perkapita berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat. PDRB perkapita tidak signifikan bukan berarti PDRB perkapita tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kutai Barat akan tetapi data yang dikumpulkan tidak berhasil membuktikan keterkaitan antara PDRB perkapita dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Ini dikarenakan nilai PDRB yang diperoleh masyarakat tidak meningkatkan Asset penduduk di Kabupaten Kutai Barat dan kepemilikan PDRB hanya habis dikonsumsi oleh masyarakat.

2. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.  
Berdasarkan hasil uji t, jumlah wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), dengan hasil  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,393 > 2,365$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,048 < 0,05$ ). Perubahan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu kenaikan atau penurunan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan akan berdampak pada kenaikan atau penurunan penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Kutai Barat.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makmur (2010) tentang "Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB (pajak Bumi dan Bangunan) di Kabupaten Kutai Barat. Di mana hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan atau bersama – sama antara variabel bebas (jumlah wajib pajak sektor perkotaan dan jumlah wajib pajak sektor pedesaan) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat.
3. Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
Dari hasil analisis diperoleh bahwa PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat.  
Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (saragih,2003).  
Hal yang sama ditunjukkan dari hasil penelitian ini bahwa di Kabupaten Kutai Barat, peningkatan PDRB perkapita akan meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Kutai Barat. Pendapat ini sejalan dengan Hakim Halim (2000), bahwa Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto.
4. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
Berdasarkan hasil  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$  ( $-2,447 < -2,458 < 2,447$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,049 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi disimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran daerah. Pengeluaran tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,234 > 2,447$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,018 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Jadi disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Seiring dengan meningkatnya penerimaan PBB maka akan diikuti pula peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
6. Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hasil dekomposisi koefisien jalur sebagaimana disajikan dalam tabel 5.7 diperoleh koefisien jalur sebesar 0,8920 untuk pengaruh total PDRB perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.

Salah satu indikator penting untuk diketahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau kabupaten dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang memuat gambaran perekonomian regional secara makro.

PDRB secara agresif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

7. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hasil dekomposisi koefisien jalur sebagaimana disajikan dalam tabel 5.7 diperoleh koefisien jalur sebesar 0,7099 untuk pengaruh total Jumlah Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan nasional. Insukindro (1994) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan nasional akan menaikkan NJOP, sehingga semakin tinggi beban PBB yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Kenaikan NJOP juga dapat menciptakan wajib pajak-wajib pajak baru, di mana masyarakat yang sebelumnya tidak ditetapkan sebagai wajib pajak pada akhirnya menjadi wajib pajak baru. Oleh sebab itu, Insukindro menyimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah, dimana disimpulkan sebagai berikut :

1. PDRB perkapita berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat.
2. Jumlah Wajib Pajak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. Berarti peningkatan jumlah wajib pajak maka meningkatkan pula penerimaan PBB, namun penerimaan PBB Kabupaten Kutai Barat yang tidak stabil disebabkan oleh kurangnya ketaatan dan/atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. PDRB per Kapita berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat.
4. Jumlah Wajib Pajak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. PDRB perkapita berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat.
7. Jumlah Wajib Pajak berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diajukan saran kepada pemerintah Daerah selaku aparat yang paling bertanggung jawab terhadap masalah perpajakan :

1. Oleh karena jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB, maka akuratisasi data yaitu pemuktahiran data agar dilaksanakan sesuai dengan keadaan sesungguhnya di lapangan.
2. PDRB perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB maka kepada pemerintah kabupaten Kutai barat supaya dapat menciptakan iklim kondusif bagi investasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten Kutai Barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofir, 2000. *Optimalisasi Pajak dalam Penerapan Otonomi Daerah Berita Pajak No. 15 Januari 2000*. Jakarta.
- Adriani, P.J.A. 1992. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Anonim, 1994, *Undang-Undang RI No. 12 TAHUN 1994, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*, Jakarta.
- , 2003, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara*, Jakarta.
- , 2004, *Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.
- , 2004, *Undang – undang Noor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta
- , 2000, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Badan Pusat Statistik, 2014, *Kutai Barat Dalam Angka 2014*.
- BAPPEDA, 2015, *Profil Daerah Kabupaten Kutai Barat 2015*.
- Ahmad Antoni K. Muda, 2003, *Kamus Bahasa Ekonomi*, Cetakan 1 Gitamedia Press, Surabaya.
- Achmad Rizal (2010), *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur*, Tesis Tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Baswir, Revrison. 2001. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta.
- Bratakusumah dan Solihin (2002), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Brotodihardjo, R.Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Chalid, Pheni. 2005, “ *Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi “*. *Kemitraan Partnership*”.Jakarta
- Christina Yacob, 2007, *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Serta Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Peerimaan Pajak Hotel dan Rumah Makan di Kabupaten Kutai Barat*. Tesis, Tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, Samarinda.

- Devas, Nick dik, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1989.
- Direktorat Jenderal Pajak, 1997, *Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Iberahim, 2007, *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak dan Non Pajak di Kabupaten Kutai Barat*. Tesis, Tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Insukindro, Mardiasmo., Wahyu Widayat, Wihana Kirana Jaya, Purwanto, Abdul Halim, John Suprihanto, Budi Purnomo. (1994). *Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha peningkatan PAD*. Laporan hasil penelitian KKD. Yogyakarta: FE UGM
- Irawan, M. Suparmoko, 1995, *Ekonomika Pembangunan*, Edisi 5 Cetakan ke empat, Yogyakarta, Penerbit BPFE
- Kaho J. Riwu. 2007. *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah*, Rineka Cipta
- Makmur 2010, *Faktor – factor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB-Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat*. Jurnal Eksis.
- Mamesa, DJ. (2004). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Mangkoesebroto, Guritno, 1993, *Ekonomi Publik, Edisi-III*, BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo, 1997, *Perpajakan*, Edisi ke-3, Andi, Yogyakarta.
- , 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A. 1993 *Keuangan negara dalam teori dan praktek*, Erlangga, Jakarta.
- Partadiredja, 2003, *Pelaksanaan Pajak Perseorangan*, Cetakan Jakarta.
- Prayitno, Dwi, 2009. *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Rachmad Soemitro, 2000, *Hukum Perpajakan dan Pajak Pendapatan*, Jeresco, Bandung.
- Riduwan, Engkos A. Kuncoro, 2010, *Cara Menggunakan dan Menggunakan Path Analysis (Analisis Jalur)*, ALFABETA Bandung.
- R. Soemitro, Z. Muttaqin, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Cetakan 4, Edisi Revisi, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Rahman, Herlina. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*.

- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sarwoko, 2005. *Dasar - Dasar Ekonometrika*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Sasana, H. 2005. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)*, *Dinamika Pembangunan*, Vol. 2, Juli 2005, Hal. 19-29.
- Supianti (2007), *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan di Kabupaten Kutai Timur*, Tesis Tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Siti Yusnani, 2014, *Faktor – factor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur*, Tesis, Tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. (2002), *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Sri, Valentina dan Aji Suryo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat
- Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.